



LAPORAN KINERJA 2019

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2019 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 13 indikator sasaran dan mengacu pada 3 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2019 dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- Misi 1: terdiri dari 3 sasaran, 11 indikator kinerja, sebanyak 3 indikator kinerja melampaui target, 6 indikator kinerja mencapai sesuai target, 1 indikator tidak mencapai target dan 1 indikator kinerja tidak ada realisasi.
- Misi 2: terdiri dari 1 sasaran, 1 indikator kinerja, sebanyak 1 indikator kinerja tidak mencapai target.
- Misi 4: terdiri dari 1 sasaran, 1 indikator kinerja, sebanyak 1 indikator kinerja mencapai sesuai target.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2018, sebagai konsistensi dari komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai yaitu:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI, PENGKOORDINASIAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH YANG PRIMA”

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023. Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras seluruh aparatur pemerintah terutama aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

Sinjai, Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. AKBAR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja.....	1
1.3 Gambaran Organisasi.....	1
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	6
2.2 Visi dan Misi.....	6
2.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah	8
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	11
3.2 Capaian Indikator Kinerja 2019	11
3.2.1 Pengukuran Kinerja Misi 1.....	12
3.2.2 Pengukuran Kinerja Misi 2.....	24
3.2.3 Pengukuran Kinerja Misi 4.....	26
3.3 Realisasi Anggaran.....	29
3.3.1 Belanja Tidak Langsung	30
3.3.2 Belanja Langsung.....	31
BAB IV PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018–2023, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 disusun dengan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

1.3 Gambaran Organisasi

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, 10 (Sepuluh) Bagian dan 30 (Tiga puluh) Subbagian.

Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, disebutkan bahwa tugas pokok Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan pemerintah daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program satuan kerja perangkat daerah, sesuai dengan kebijakan Bupati;
- c. mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- d. mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada para Asisten;
- e. membina dan mengevaluasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
- f. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah;
- g. mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur atau pedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan Bupati;
- h. menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan dan administrasi umum
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah;
- k. menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas di lingkup Sekretariat Daerah;
- l. mengoordinasikan, pembinaan dan mengevaluasi terhadap kegiatan satuan kerja perangkat daerah dalam upaya peningkatan hasil pelaksanaan tugas di daerah
- m. memberikan pelayanan teknis administratif kepada Bupati, Wakil Bupati dan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah;
- n. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- o. mengoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Bupati;
- p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan/strategi kebijakan pemerintah daerah;
- q. melaksanakan tertib organisasi dan tertib hukum pemerintah daerah berdasarkan kebijakan Bupati;

- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah; dan
- s. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang besar dan strategis didukung oleh pegawai sebanyak 87 orang, yang memiliki keragaman latar belakang pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pangkat, golongan dan masa kerja.

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari 13 orang golongan IV, 74 orang Golongan III, dan 12 orang Golongan II. Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai dengan Golongan III merupakan jumlah terbesar. Rincian PNS berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai
Menurut Golongan, Tahun 2019

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya/IVd	1 Orang
2	Pembina Utama Muda/IVc	4 Orang
3	Pembina Tk.I/IVb	4 Orang
4	Pembina/IVa	4 Orang
5	Penata Tk.I/IIIId	15 Orang
6	Penata/IIIc	16 Orang
7	Penata Muda Tk.I/IIIb	32 Orang
8	Penata Muda/IIIa	11 Orang
9	Pengatur Tk.I/IId	2 Orang
10	Pengatur/IId	4 Orang
11	Pengatur Muda Tk.I/IId	3 Orang
12	Pengatur Muda/IId	3 Orang
Jumlah		99 Orang

Sumber data: Bagian Umum dan Protokol, Desember 2019

Berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS pada Sekretariat Daerah terdiri dari Doktor sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 13 orang, S1 sebanyak 72 orang, Diploma III sebanyak 1 Orang dan SLTA 11 orang. Dengan latar belakang pendidikan seperti ini, menunjukkan bahwa pendidikan formal para pegawai di Sekretariat Daerah berada pada kategori baik, sebab jumlah berlatar belakang pendidikan Strata 1 merupakan jumlah dengan persentase terbesar. Rincian PNS berdasarkan tingkat pendidikan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	2 Orang
1	Strata 2 (S2)	13 Orang
2	Strata 1 (S1)	72 Orang
3	Diploma III (D3)	1 Orang
4	Diploma II (D2)	0 Orang
5	Diploma I (D1)	0 Orang
6	SMA/Sederajat	11 Orang
7	SMP/Sederajat	0 Orang
8	SD	0 Orang
Jumlah		99 Orang

Sumber data: Bagian Umum dan Protokol, Desember 2019

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 sebanyak 99 orang. Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai sebagian besar merupakan pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang lama dan mereka pada umumnya berpengalaman pada beberapa Perangkat Daerah lain sebelum ditempatkan di Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Pelaporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan Pelaporan Kinerja
3. Gambaran Organisasi
4. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGI DAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Strategi Organisasi
2. Visi dan Misi
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja
2. Capaian Indikator Makro
3. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja
4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon III Mandiri, Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unit Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD serta Visi Misi Kabupaten Sinjai dan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf (*staffing*), fasilitasi dan unsur staf perumus (*drafter*) harus selalu berada di depan dalam meningkatkan pelayanan administratif dan pelayanan umum terhadap aparatur.

Oleh karena itu sebagai unsur staf (*staffing*) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergi dalam melaksanakan amanat institusional.

2.2 Visi Dan Misi

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai 2018-2023 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan, Dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing”*, maka visi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, merupakan penjabaran dan cara pelaksanaan salah satu misi dari Visi Tersebut yakni :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN INFORMASI,
PENGKOORDINASIAN DAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH YANG PRIMA”**

Adapun penjelasan pengertian Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai di atas adalah sebagai berikut :

Pelayanan Administrasi dan Informasi fungsi pelayanan administrasi pemerintahan baik kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Kelurahan serta Desa maupun pelayanan administrasi kepada *stakeholder* dari kalangan luar Pemerintah Kabupaten. Pelayanan informasi yang dimaksud adalah memberikan informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah kabupaten. Pelayanan administrasi dan informasi tersebut dilaksanakan guna menghubungkan secara sinergis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat, didukung aparat yang profesional, serta dalam pelaksanaannya senantiasa mengedepankan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pengoordinasian dan Perumusan Kebijakan Daerah menguatkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah selaku advisor dan fasilitator dalam menghubungkan dan mengharmonisasikan program antar unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan menguatkan peran Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan dan penerbitan pedoman-pedoman dalam bentuk produk hukum daerah yang responsif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah serta memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi seluruh pelanggan/*stakeholders*.

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Kabupaten Sinjai sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka ditetapkan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi dan Informasi Publik, melalui peningkatan Kapasitas Organisasi, Manajemen dan Administrasi Keuangan, Asset serta sumber daya aparatur Pemerintah Daerah melalui penerapan prinsip Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas.
- b. Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
- c. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dalam mewujudkan Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup terdepan dalam Pelayanan Publik.

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

➤ Tujuan

Untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, peran dan kewenangan Sekretariat Daerah maka dirumuskan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dasar Minimal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan

➤ Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Koordinasi Administratif Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal
4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dasar Minimal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-Nilai Relegius Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
1.	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkonisasi dengan peraturan perundang-undangan	Produk	18
		Persentase penanganan masalah hukum	%	90
2.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rata-rata nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan	%	75
		Terkendalinya laju inflasi daerah	%	3-4
		Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik	%	82
		Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	%	77
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	%	100
		Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	%	100

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, tata kelola keuangan dan pelayanan internal	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100
		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah		B
		Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan	%	87
4.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase target SPM perangkat daerah yang dapat dicapai	%	100
5	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kegiatan mental-spiritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Kegiatan	6

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO .	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja 2019

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018–2023. 5(lima) sasaran yang telah ditetapkan memiliki 13 indikator sasaran yang terdiri dari 11 indikator untuk Misi 1, 1 indikator untuk Misi 2 dan 1 indikator untuk Misi 4.

3.2.1 Pengukuran Kinerja Misi 1

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Berlandaskan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Profesional, Transparan dan Partisipatif”

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Analisis pencapaian Sasaran 1 : **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah** dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Thn 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan	Produk	18	32	177
Persentase penanganan masalah hukum	%	90	130	144
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja				160

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung pada sasaran **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah**, untuk indikator kinerja persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan yakni dengan target 18 produk realisasinya 32 produk. Sedangkan untuk indikator kinerja persentase penanganan masalah hukum capaian kinerjanya. Untuk sasaran Persentase penanganan masalah hukum capaian kinerjanya melampaui target dengan terget 90% realisasi 130%.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2018	2019
Persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan		32 Produk
Persentase penanganan masalah hukum		130%

Capaian kinerja indikator Persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dan persentase penanganan masalah hukum, untuk Tahun ini dibandingkan dengan Tahun lalu masing-masing terjadi peningkatan.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
Persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan	Produk	95	32	33
Persentase penanganan masalah hukum	%	93	130	139

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, maka 2 indikator kinerja yaitu persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dengan capaian 33% (32 Produk) dari target 95 Produk dan indikator kinerja persentase penanganan masalah hukum telah mencapai 130% dan telah melampaui target kondisi kinerja jangka menengah.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan:

1. Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan program pengharmonisasian dan sinkronisasi produk hukum daerah.
2. Ketersediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program pengharmonisasian dan sinkronisasi produk hukum daerah.

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja penanganan masalah hukum antara lain:

1. Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan program bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
2. Terjalinnnya hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi pemberi bantuan hukum
3. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum cukup tinggi
4. Ketersediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan masalah hukum.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

1. Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah sebesar Rp. 321.835.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 320.948.444,- atau 99,72% dengan capaian kinerja 177%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,28%.
2. Anggaran yang direncanakan untuk indikator kinerja Persentase penanganan masalah hukum tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah Rp. 269.540.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 218.409.200 atau 81% dengan capaian kinerja 144%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4. Kegiatan Asistensi dan Penyelarasan Rancangan Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Edaran Bupati dan MOU/Perjanjian
5. Kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
6. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang undangan
7. Kegiatan Pengembangan RAN-HAM
8. Kegiatan Pembinaan Kadarkum

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah

Analisis pencapaian Sasaran 2 : **Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah** dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Thn 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan	%	75	81,5	108,7
Terkendalnya laju inflasi daerah	%	3-4	0.01	98
Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik	%	82	82	100
Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	%	77	-	-
Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	%	100	100	100
Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	%	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja				84,45

Dari 6 indikator kinerja yang mendukung pada sasaran **Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah**, untuk indikator kinerja Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan capaian kinerjanya melampaui target yang ditentukan yakni target dengan nilai 75 realisasi 81,52 capaian kinerjanya 108,7%, indikator kinerja Terkendalnya laju inflasi daerah capaian kinerjanya mencapai 98 persen dengan realisasi tingkat inflasi sebesar 0,01 persen, indikator kinerja presentase ASN (Tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik dengan capaian 82% atau realisasinya 100%, realisasi indikator kinerja persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi untuk tahu 2019 belum keluar hasilnya dari Kemenpan-RB sedangkan tahun 2018 indikator kinerja ini tidak mencapai target yang ditentukan, indikator kinerja

Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 100 persen dengan realisasi 100 persen, indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan capaian kinerjanya 100 persen atau mencapai target yang ditetapkan.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2018	2019
1	Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan	80,84	81,52
2	Terkendalnya laju inflasi daerah	0,25%	0,01%
3	Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik		82%
4	Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	57,11	-
5	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	100%	100%
6	Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja dari 6 indikator kinerja untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni indikator Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan tahun ini melampaui target dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 80,84 pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,52 pada tahun 2019, indikator kinerja Terkendalnya laju inflasi daerah terjadi peningkatan untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 0,25 persen pada tahun 2018 menjadi 0,01 persen pada tahun 2019, indikator kinerja persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu dengan capaian di tahun 2019 sebesar 82%, capaian kinerja indikator persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu, indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu mencapai target pada 2 (dua) tahun terakhir 2018 dan 2019 yaitu 100 persen, indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan mencapai target sama dengan tahun lalu sebesar 100 persen.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2019	Capaian (%)
Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan	%	85	81,52	95,88
Terkendalnya laju inflasi daerah	%	4-6	0,01	98
Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik	%	90	82	91,11
Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	%	80	-	-
Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	%	100	100	100
Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan realisasi dari 6 (enam) indikator kinerja terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, yakni realisasi indikator kinerja rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan telah mencapai 95,88 persen, indikator kinerja terkendalnya laju inflasi daerah telah mencapai 98% dengan capaian kinerja 0,01 persen, realisasi indikator kinerja persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik telah mencapai 91,11%, realisasi indikator kinerja persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi untuk tahun 2019 belum keluar hasilnya dari Kemenpan-RB, indikator kinerja ini tidak mencapai target yang ditentukan, indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu telah mencapai 100 persen, indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan telah mencapai 100 persen.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung keberhasilan indikator rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan antara lain:

- a. Telah dilakukan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk menyamakan persepsi sehingga hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil
- b. Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala untuk menilai apakah perbaikan telah dilakukan dan memberikan dampak peningkatan kepuasan masyarakat dan apakah ada inovasi dari masing-masing satuan kerja penyedia layanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.
- c. Perangkat Daerah yang dijadikan contoh telah melakukan pemenuhan aspek penilaian oleh Kemenpan-RB.

Faktor penyebab tercapainya target pada indikator kinerja terkendalinya laju inflasi daerah adalah:

1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sinjai secara rutin melakukan pemantauan kebutuhan pokok masyarakat yang berpotensi menjadi penyumbang inflasi.
2. Tim TPID merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Koordinasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga mampu menjaga stabilitasi harga pada sejumlah komoditas.

Solusi yang telah dilakukan:

1. Semakin meningkatkan intensitas pemantauan dan pengawasan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi.
3. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengendalian inflasi.

Faktor pendukung keberhasilan indikator Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik antara lain:

1. Kualitas pelayanan publik pada Pemerintah salah satu bergantung pada komponen-komponen pembentuknya yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.
2. Kemampuan aparat/pelayan publik yang memanfaatkan perkembangan teknologi dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Faktor pendukung keberhasilan indikator persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi antara lain:

1. Telah melakukan penginputan data pada level I sampai pada level III di Kemenpan RB tepat waktu
2. Kerjasama antar OPD terjalin dengan baik.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu adalah Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan

sesuai rencana yang telah ditetapkan dan Sumber Daya Aparatur yang terlibat bekerja sesuai dengan prosedur dan kompetensinya.

Faktor penyebab tercapainya target indikator persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan adalah:

1. Indikator kinerja kunci LPPD telah terpenuhi dan Dokumen LPPD disampaikan tepat waktu
2. Peringkat dan status kinerja LPPD tingkat provinsi dan peringkat nasional mencapai target, yaitu peringkat 24 Nasional dari target peringkat 60 Nasional
3. Profesionalisme Tim Penyusun LPPD dalam menyusun dan mempersiapkan data terkait penyusunan LPPD.

Solusi yang telah dilakukan:

1. Melaksanakan Bimtek Penyusunan LPPD dalam rangka mensosialisasikan aturan-aturan dan petunjuk teknis terkait penyusunan LPPD kepada tim penyusun
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada Biro Pemerintahan Provinsi dan Inspektorat Daerah Provinsi terkait hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan LPPD.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah sebesar Rp. 93.751.850 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 91.592.500 atau 97,70% dengan rata-rata capaian kinerja 100% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,3%.

Nilai anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja terkendalinya laju inflasi daerah dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah sebesar Rp. 129.021.730 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 126.766.504 atau 98,25% dengan capaian kinerja 98%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 1,75%.

Besaran anggaran yang direncanakan pada indikator Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah sebesar Rp. 133.646.850 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 123.549.334 atau 94,44% dengan capaian kinerja 82% sehingga terjadi efisiensi sebesar 5,56%.

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah sebesar Rp. 135.096.850 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 129.473.071 atau 95,84% sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,16%.

Jumlah anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah sebesar Rp. 440.604.791 dari anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp. 367.334.041 atau 83,37% dengan capaian 100%, sehingga terjadi efesiensi sebesar 4,17%.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 untuk indiketor kinerja Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah** adalah sebesar Rp. 166.670.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 159.713.000,- atau 95,83% dengan capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,17%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran atas indikator kinerja Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan adalah Program Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah Survei Kepuasan Masyarakat.

Program pendukung atas indikator kinerja terkendalnya laju inflasi daerah adalah Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian sedangkan kegiatan yang menunjang adalah Pengendalian Laju Inflasi Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini melakukan pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait secara berkala dan pengendalian inflasi memerlukan penyelesaian berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian baik yang ada ditingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi.

Program pendukung indikator Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik adalah Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik sedangkan kegiatan yang menunjang adalah Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik.

Program pendukung indikator kinerja persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi adalah Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah program Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik sedangkan kegiatan yang menunjang adalah Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi.

Program pendukung indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu adalah Program Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan sedangkan kegiatan yang menunjang adalah Koordinasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan, Penyusunan dokumen pengendalian pembangunan dan Evaluasi percepatan penyerapan anggaran.

Program pendukung indikator kinerja Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan adalah Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan sedangkan kegiatan yang menunjang adalah Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ILPPD.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal

Analisis pencapaian Sasaran 3 : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal** dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100
Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	%	B	B	100
Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan	%	85	85	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja				100

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal**, indikator kinerja persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP capaian kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100 persen dengan capaian 100 persen, indikator kinerja hasil penilaian SAKIP perangkat daerah capaian targetnya sesuai dengan yang direncanakan yakni predikat “B” dengan capaian 100 persen, indikator kinerja Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan realisasi capaian sebesar 85% dengan capaiannya 100%.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	
	2018	2019
Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP		100
Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	B	B
Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan		85

Jika dilihat dari 3 indikator kinerja, capaian kinerja tahun 2019 untuk indikator kinerja persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, untuk capaian kinerja hasil penilaian SAKIP perangkat daerah dibandingkan dengan tahun lalu mencapai target sama yaitu predikat “B”, capaian kinerja Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 85%.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator sasaran	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100
Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	%	BB	B	95
Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan	%	95	85	89,47

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi dari 3 (tiga) indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, maka untuk indikator kinerja Persentase Penyusunan Keuangan dan Barang sesuai SAP realisasi capaiannya telah mencapai sebesar 100 persen, indikator kinerja Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah realisasi capaiannya telah mencapai predikat penilaian “B” atau 95 persen sedangkan indikator

kinerja persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan realisasi capaiannya telah mencapai 89,47%

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja Persentase Penyusunan Keuangan dan Barang sesuai SAP adalah Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan Sumber Daya Aparatur yang terlibat bekerja sesuai dengan prosedur dan kompetensinya.

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja hasil penilaian SAKIP perangkat daerah antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan pada kualitas dokumen SAKIP pada seluruh perangkat daerah
2. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja (LKj) masing-masing perangkat daerah pada seluruh perangkat daerah

Faktor pendukung keberhasilan indikator Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan adalah Sumber Daya Aparatur bekerja sesuai dengan kompetensinya.

- e. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal** adalah sebesar Rp. 93.095.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 91.950.507,- atau 98,77%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,23%.

Indikator kinerja Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal** merencanakan anggaran sebesar Rp. 86.292.760 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 86.082.182 atau 99,76% dengan rata-rata capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,24%.

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Internal** adalah sebesar Rp. 232.163.500 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 230.350.528 atau 99,21 dengan capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,79%

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan indikator kinerja Persentase penyusunan keuangan dan barang sesuai SAP dalam pencapaian sasaran adalah Program Pelayanan Perkantoran dan Program Pelaporan Kinerja

Kegiatan pendukung antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah
3. Penyusunan dan Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. Sinjai
4. Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program dan Kegiatan
5. Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan
6. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
7. Penatausahaan administrasi Gaji
8. Penatausahaan pengelolaan keuangan
9. Penyediaan Data Inventaris Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah program Pelaporan Kinerja, sedangkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah Penyusunan dan Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sinjai

Program yang menunjang keberhasilan indikator kinerja Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan adalah Program Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sedangkan kegiatan pendukungnya adalah

1. Evaluasi Penataan Kelembagaan
2. Evaluasi dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
3. Penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

3.2.2 Pengukuran Kinerja Misi 2

“Mewujudkan Peran Kabupaten Sinjai sebagai Penyelenggara Pelayanan Dasar yang Memuaskan serta sebagai Pusat Pelayanan pada Bidang-Bidang Strategis.”

Sasaran 4

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Analisis pencapaian Sasaran 4 : **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Persentase target SPM perangkat daerah yang dapat dicapai	%	100	85	85

Indikator kinerja Persentase target SPM perangkat daerah yang dapat dicapai pada sasaran **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** capaian kinerjanya 85 persen atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan karena ada beberapa indikator SPM yang belum terlaksana. Dari 29 indikator dari 6 urusan pelayanan dasar hanya 85 persen yang realisasi.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	
	2018	2019
Persentase target SPM perangkat daerah yang dapat dicapai	80%	85%

Capaian kinerja indikator Persentase target SPM perangkat daerah yang dapat dicapai untuk beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami peningkatan dari 80% di tahun 2018 meningkat menjadi 85% ditahun 2019

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator sasaran	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase target SPM perangkat daerah yang dapat dicapai	%	100	85	85

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, maka capaiannya telah mencapai 85 persen.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terdapat dua indikator SPM pada urusan pelayanan dasar perumahan rakyat yang tidak dapat dicapai dikarenakan tidak adanya program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM. Hal ini menyebabkan persentase keseluruhan capaian persentase penerapan SPM tidak efektif dan tidak mencapai target.

- e. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** adalah sebesar Rp. 62.605.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 61.630.719,- atau 98,44%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,56%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah Program Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

3.2.3 Pengukuran Kinerja Misi 4

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”

Sasaran 5

Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat

Analisis pencapaian Sasaran 1 : **Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat** dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Thn 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Kegiatan mental spritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Kegiatan	6	6	100

Indikator kinerja Kegiatan mental-spritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi capaian kinerjanya yakni 100 persen dari target 6 kegiatan atau 2995 orang yang difasilitasi dengan realisasi 6 kegiatan atau 2995 orang atau capaian kinerja sebesar 100 persen.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2018	2019
Kegiatan mental spritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	2965	2995

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator kinerja kegiatan mental-spritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi pada sasaran **Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat** mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Kegiatan mental spritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Orang	5511	2995	54

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, maka capaiannya telah mencapai 54 persen.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Tim kerja yang solid dan bertanggungjawab dengan tugas yang telah diberikan.
2. Tim teknis lebih aktif melakukan koordinasi dan menghadiri rapat terkait.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada indikator kinerja Kegiatan Mental-Spiritual, Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat** adalah sebesar Rp. 5.436.043.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.433.087.748,- atau 99,94%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,06%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Mental-Spiritual, Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan**

Bermasyarakat yaitu Peningkatan Bidang Mental Spiritual, Sosial Kemasyarakatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bidang Kesra
 - b. Kegiatan Safari Ramadhan
 - c. Kegiatan Pengembangan Syiar Islam
 - d. Kegiatan Pelatihan Qari dan Qariah
 - e. Kegiatan Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten dan mengikuti STQ Tingkat Provinsi
 - f. Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Haji Kabupaten Sinjai
 - g. Kegiatan Pelatihan Muballiq dan Muballiqah Tingkat Kabupaten Sinjai

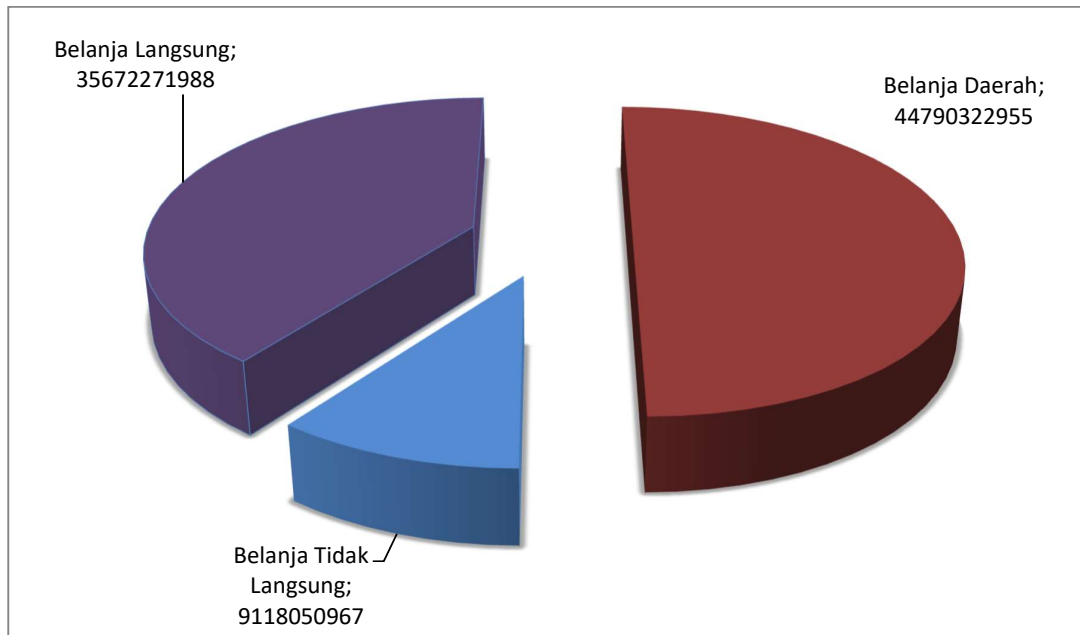
3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi pendapatan pada tahun 2019 dapat dijelaskan dengan skema deskriptif sebagaimana berikut:

Tabel 3.22
Target Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

No. Kode Rek.	Uraian	Target	Realisasi
5	Belanja Daerah	Rp.47.401.980.246,79	Rp.44.790.322.955
5 1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 10.215.713.675,79	Rp. 9.118.050.967
5 2	Belanja Langsung	Rp.37.186.266.571	Rp.35.672.271.988

Gambar 3.1
Realisasi Belanja Tahun 2019

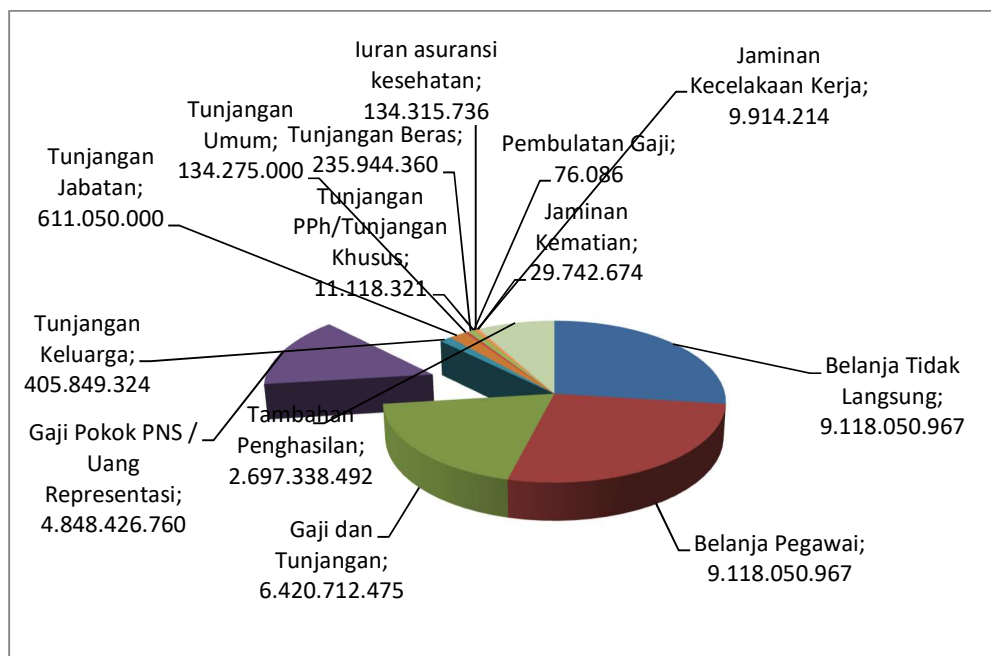


3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.23
Target Anggaran dan Realisasi
Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Langsung	10.215.713.675,79	9.118.050.967
Belanja Pegawai	10.215.713.675,79	9.118.050.967
Gaji dan Tunjangan	6.921.506.920	6.420.712.475
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.035.842.290	4.848.426.760
Tunjangan Keluarga	510.216.000	405.849.324
Tunjangan Jabatan	729.680.000	611.050.000
Tunjangan Fungsional	0	0
Tunjangan Umum	149.380.000	134.275.000
Tunjangan Beras	280.699.920	235.944.360
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.800.000	11.118.321
Pembulatan Gaji	94.710	76.086
Iuran Asuransi Kesehatan	141.780.000	134.315.736
JKK	10.674.000	9.914.214
JKM	32.340.000	29.742.674
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	3.294.206.755,79	2.267.338.492

Gambar 3.2
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

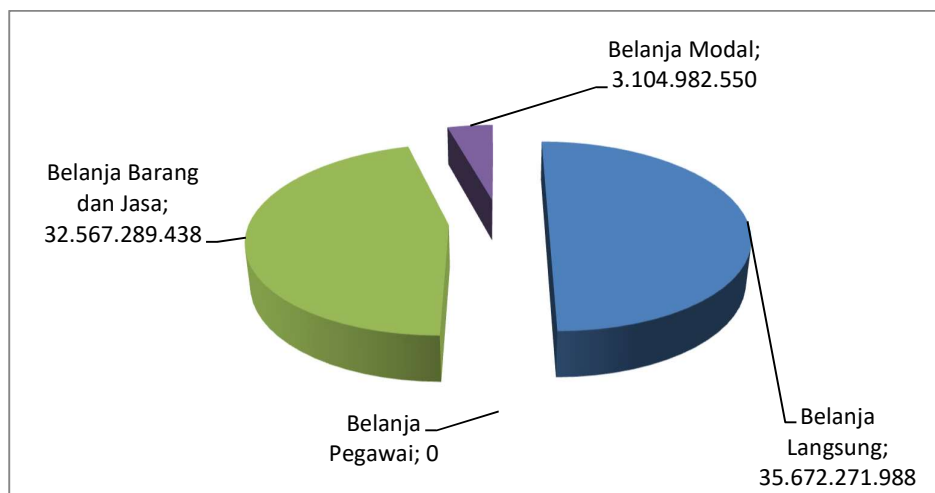


3.3.2 Belanja Langsung

Tabel 3.24
Target Anggaran dan Realisasi
Belanja Langsung Tahun 2019

No. Kode Rek.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
5 2	Belanja Langsung	37.186.266.571	35.672.271.988
5 2 1	Belanja Pegawai	0	0
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	34.051.469.521	32.567.289.438
5 2 3	Belanja Modal	3.134.797.050	3.104.982.550

Gambar 3.3
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pembuatan laporan kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 menggambarkan Keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran dan analisis efektifitas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja.

Dari 5 (lima) sasaran dengan 13 indikator kinerja sebagaimana dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019, secara rinci **pencapaian sasaran** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 160% atau melampaui target secara umum.
2. Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 84,45% atau tidak mencapai target.
3. Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 100% atau mencapai target.
4. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian kinerja 85% atau tidak mencapai target yaitu 85% dari target 100%.
5. Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian kinerja 100% atau mencapai target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum mencapai nilai rata-rata 105,89%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran dapat disimpulkan bahwa:

- 1 (satu) melampaui target.
- 2 (dua) sesuai target.
- 2 (dua) tidak mencapai.

Dari 13 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa:

- 3 indikator kinerja dikategorikan melampaui target.
- 7 indikator kinerja dengan kategori sesuai target.
- 2 indikator kinerja tidak mencapai target.
- 1 indikator hasil capaian kinerja masih dalam proses di Kemenpan-RB yaitu indikator Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Setda Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, dan khususnya untuk tahun 2019 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 telah mencapai 105,89%. Capaian kinerja tahun 2019 dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase produk hukum daerah yang harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan	Produk	18	32	177
		Persentase penanganan masalah hukum	%	90	130	144
2.	Meningkatnya kualitas koordinasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan	%	75	81,52	108,7
		Terkendalinya laju inflasi daerah	%	3-4	0,01	98
		Persentase ASN (tertentu) dengan kinerja pelayanan publik baik	%	82	82	100
		Persentase OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	%	77	-	-
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai peraturan dan tepat waktu	%	100	100	100
		Persentase perangkat daerah dengan dokumen LPPD dan LKPJ sesuai ketentuan	%	100	100	100

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, tata kelola keuangan dan pelayanan internal	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100
		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah		B	B	100
		Persentase OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan	%	87	87	100
4	Meningkatnya kinerja pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase target SPM perangkat daerah yang dapat dicapai	%	100	85	85
5	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Kegiatan mental-spritual, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Kegiatan	6	6	100